

Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli

Jusmalia Oktaviani
Teguh Puja Pramadya
Universitas Jenderal Ahmad Yani

Abstract

This study explains the socio-political conditions of government in the New Order era and revisits the situation at that time from the perspective of Thomas Hobbes and Niccolo Machiavelli. This is based on the desire of some parties who want to return Indonesia back to the New Order era which is considered by some people to provide political and economic stability. This paper argues that the New Order and the state power model as described by Hobbes and Machiavelli thinking placed the unity of the state as the core idea, which made the country stable and did not experience horizontal conflicts. But with globalization, the rapid development of technology and the power of social media, making Indonesia as an authoritarian state as before would be difficult, if not impossible to do. It is important to study the thoughts of these two figures because both Machiavelli and Hobbes attach great importance to the unity and integrity of the state, and avoid the state from breaking up due to conflict and war.

Keywords: *New Order, Thomas Hobbes, Niccolo Machiavelli, state power model*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan mengenai kondisi sosial politik pemerintahan pada era Orde Baru dan meninjau kembali situasi saat itu dengan perspektif Thomas Hobbes dan Niccolo Machiavelli. Hal ini didasarkan pada adanya keinginan beberapa pihak yang ingin mengembalikan Indonesia pada masa Orde Baru yang dianggap memberikan kestabilan politik dan ekonomi. Tulisan ini berpendapat bahwa Orde Baru dan model negara kekuasaan seperti yang digambarkan oleh pemikiran Hobbes dan Machiavelli menempatkan kesatuan negara sebagai yang utama, yang membuat negara menjadi stabil dan tidak mengalami konflik horizontal. Namun dengan adanya globalisasi, perkembangan pesat teknologi dan kekuatan sosial media, maka menjadikan Indonesia sebagai negara otoriter seperti dulu akan sulit, bila tidak disebut mustahil untuk dilakukan. Penting untuk mempelajari pemikiran kedua tokoh ini karena baik Machiavelli maupun Hobbes mementingkan persatuan dan keutuhan negara, serta menghindari negara menjadi pecah karena konflik dan peperangan.

Kata-kata kunci: *Orde Baru, Thomas Hobbes, Niccolo Machiavelli, negara kekuasaan*

Pendahuluan

Sejak tahun 1966 hingga 1998, Indonesia memasuki masa Orde Baru, menggantikan rezim sebelumnya, yakni Orde Lama, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa Orde Baru ini dipimpin oleh Suharto, yang kemudian menjadi presiden yang paling lama menjabat di Indonesia, hingga 32 tahun lamanya, sebelum akhirnya pada tahun 1998, beliau dipaksa turun dari jabatannya oleh rakyat. Orde Baru erat kaitannya dengan dominasi negara dalam segala aspeknya. Menurut pandangan Fatimah (2007), Orde Baru dikategorikan sebagai periode pemerintahan yang paling buruk dalam hal manajemen dan pengaplikasian nilai-nilai yang terkait HAM dan demokrasi. Sentralisasi sumber daya dan kekuasaan penuh atas stabilitas politik yang dibangun dari peluang yang diberikan Suharto terhadap loyalis pemerintahannya dalam hal pembangunan yang tak lepas dari kata korupsi. Negara menerapkan politik yang sifatnya represif demi menghentikan tindakan-tindakan yang dianggap subversif terhadap pemerintah. Setiap potensi konflik yang dianggap bisa mengganggu keamanan negara dan menghambat pembangunan akan segera dihilangkan dan diselesaikan dengan berbagai cara yang pemerintahan Suharto anggap efektif. Oleh karenanya, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang bahkan hingga kini belum tuntas, misalnya kasus penculikan dan pembunuhan aktivis HAM, kasus dukun santet, kasus ninja, terbunuhnya preman atau pria bertato secara misterius, serta dipenjara dan disiksanya para tahanan politik.

Dengan berbagai kondisi dan situasi yang digambarkan di atas, ternyata tidak lantas menghilangkan keinginan sebagian masyarakat dan tokoh elit politik untuk mengulang kembali nostalgia masa lalu terhadap 'kejayaan semu' yang mereka pernah rasakan selama masa Orde Baru. Di dunia nyata maupun maya, meme seperti '*penak jamanku toh?*' serta sebutan gerakan SARS (Sindrom Aku Rindu Suharto) menjadi representasi nostalgia pada masa Suharto. Keberadaan Partai Berkarya, yang didirikan oleh Tommy Suharto, nyata-nyata mendompleng dan mengusung kembali nama besar sang ayah. Argumen-argumen yang dikemukakan bahwa masa itu merupakan masa yang paling stabil dalam kondisi politik ekonomi Indonesia bahkan sempat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen. Selama masa itu pula jarang terjadi konflik horizontal, murahnya harga bahan pokok, swasembada beras, serta status Indonesia yang merupakan eksportir minyak menjadi alasan mengapa masa Orde Baru kembali dirindukan.

Pembicaraan mengenai kebijakan-kebijakan masa Suharto kembali menjadi diskursus di masyarakat, di antaranya yakni tugas perbantuan TNI yang dikhawatirkan menjadi bibit bagi dwifungsi TNI dan kembalinya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wacana tersebut tentu mengkhawatirkan bagi sebagian aktivis HAM yang tidak ingin memberikan celah

bagi hadirnya Orde Baru jilid kedua. Dalam konteks penelitian ini, penulis berusaha melihat lebih dalam mengenai konsep pemikiran Machiavelli dan Hobbes mengenai model Negara Kekuasaan yang dirasa tepat untuk meninjau Orde Baru, satu episode di mana Indonesia pernah berada dalam situasi kemakmuran yang semu di bawah kepemimpinan Suharto. Hal ini agar nostalgia pada masa Orde Baru bisa dilihat secara objektif dari sisi intelektualitas untuk menghindari klaim yang berlebihan terhadap kondisi ekonomi dan politik di masa itu.

Alasan penulis meninjau dari kedua pemikir tersebut salah satunya karena keduanya mendukung absolutisme negara dan penguasa, yang penulis pertimbangkan bisa meninjau Orba secara obyektif. Beberapa literatur terdahulu mengenai Hobbes dan Machiavelli sudah cukup banyak. Di antaranya adalah tulisan Ogbazi (2019) yang berjudul *State Absolutism and Moral Agency in the Political Philosophy of Thomas Hobbes and Niccolo Machiavelli: Implications for Eritrea* yang membahas mengenai pemikiran Hobbes dan Machiavelli dalam konteks negara Eritrea. Ogbazi memberikan gambaran Eritrea sebagai salah satu negara yang pernah mengalami masa absolut atau totalitarian, ditinjau dari pemikiran Hobbes dan Machiavelli, khususnya dalam hal hilangnya hak-hak individu. Sementara itu, Winter (2014), dalam tulisannya berjudul *The Prince and His Art of War: Machiavelli's Military* membahas pemikiran Machiavelli secara umum dari kedua bukunya, *The Prince* dan *The Art of War*. Dengan kata lain, Winter melakukan tinjauan pemikiran kedua buku Machiavelli terutama dari sisi pertahanan-keamanan negara. Tulisan ketiga, yakni mengenai perspektif Machiavelli yakni oleh Ledeen (1999) yang berjudul *Impeachment: The Machiavellian View* yang memandang kesesuaian pemikiran Machiavelli dalam konteks korupsi di Amerika Serikat, terutama pada masa Presiden Bill Clinton. Buku *The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes, Meaning and Failure of a Political Symbol* oleh Carl Schmitt (1996) memuat bagaimana Hobbes mengejawantahkan *Leviathan* dari sebuah simbol mitologi, menjadi lekat dengan simbol politik dimana negara yang kuat dan menebarkan terror justru akan membawa perdamaian. Jo Ann Cavallo (2014) membahas lebih dalam mengenai istilah *liberta/liberty* terutama kaitannya dengan kepemilikan personal atau pribadi. Sebagai contoh, pembahasan mengenai pembayaran pajak, penghormatan terhadap kepemilikan individu, serta pemisahan ekonomi dan politik. Hal ini untuk menghindarkan pemimpin (*The Prince*) agar tidak dibenci oleh rakyat, sehingga harus ada penghormatan terhadap kepemilikan pribadi seseorang. Artikel-artikel di atas memberikan sumbangsih bagi penulis untuk melihat bagaimana penelitian dilakukan dengan menggunakan pokok pikiran Hobbes dan Machiavelli tersebut.

Dari dalam negeri, terutama tulisan yang membahas mengenai Orde Baru, Yusdani (2004) membahas mengenai pemilihan atas figur pemimpin

nasional. Dalam tulisan ini menyarankan adanya suatu formulasi terhadap kriteria pemimpin bangsa, karena pemimpin pasca Era Orde Baru tidak banyak memberikan perubahan signifikan pada kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada kemunculan figur Suharto yang salah satunya ada istilah 'SARS: Sindrom Aku Rindu Suharto. Hal ini memunculkan kesan bahwa masyarakat sampai pada titik yang putus asa karena ingin kembali pada masa lalu. Sementara itu, Yusuf (2012) membahas mengenai kritiknya terhadap pemikiran politik kontemporer yang diinspirasi oleh pemikiran Barat, dalam hal ini ia mengambil pemikiran Hobbes dan Machiavelli. Menurutnya, karena pemikiran kedua tokoh yang sangat mementingkan kekuasaan negara, masyarakat menjadi korban atas ambisi dari penguasa. Segala cara dilakukan untuk pencapaian *power*, tanpa melihat bahwa masyarakat tak lebih menjadi alat untuk pencapaian kekuasaan tersebut. Merajalelanya politik uang, intimidasi atau menakut-nakuti pihak pesaing, serta bersikap diskriminatif terhadap kelompok yang berbeda pendapat, menurutnya adalah contoh bagaimana pemikiran politik dari Barat telah menjadi bagian dari perpolitikan Indonesia. Yusuf mengungkapkan bahwa pemikiran politik Islam adalah jawaban dari kegaduhan politik yang melanda masyarakat saat ini.

Pemikiran Hobbes dan Machiavelli mengenai negara menginspirasi perspektif realisme dalam Hubungan Internasional, yang mana dalam realisme sangat menekankan kepentingan negara serta pencapaian *power*. Pemikiran mereka masih digunakan sebagai referensi untuk menjelaskan perilaku negara yang cenderung mementingkan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, pandangan Hobbes dan Machiavelli digunakan oleh penulis untuk menjelaskan kondisi politik negara yang punya kecenderungan otoriter dan totaliter seperti NKRI di zaman Orde Baru tersebut. Tulisan ini akan memuat mengenai pemikiran Hobbes dan Machiavelli dalam model negara kekuasaan, serta absolutisme politik pada masa Orde Baru serta kaitannya dengan pemikiran Machiavelli dan Hobbes.

Adanya pendapat-pendapat di masyarakat untuk mengembalikan Indonesia seperti zaman Suharto haruslah melalui pemikiran mendalam, bukan semata nostalgia tanpa mempertimbangkan aspek keilmuan, salah satunya adalah melakukan tinjauan kritis. Tinjauan kritis yang dirasa tepat yakni dengan menggunakan pemikiran Hobbes dan Machiavelli yang mengutamakan kekuatan dan keutuhan negara, terutama dominasi penguasa, sebagai yang utama. Penulis berargumen bahwa bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lain-lain sesungguhnya hanya cara untuk pencapaian tujuan negara. Kebutuhan masyarakat untuk mengembalikan cara-cara represif Orde Baru juga harus dipandang dari sudut keilmuan, dalam hal ini melihat falsafah yang menyertainya. Dengan melihat perkembangan RI yang sudah sejauh ini masuk dalam era demokrasi, otonomi daerah (bah-

kan desa) dan kebebasan berpendapat yang dibuka sangat luas, mengembalikan RI dalam sistem otoriter bukanlah solusi instan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa saat ini. Penulis berpendapat, pemikiran mengenai kembalinya Suharto sesungguhnya tidak relevan pada masa sekarang. Akan tetapi dari tinjauan melalui pemikiran Hobbes dan Machiavelli, ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari sejarah kepemimpinan Suharto selama lebih dari 30 tahun berkuasa. Tulisan ini berpendapat bahwa Orde Baru dan model negara kekuasaan seperti yang digambarkan oleh pemikiran Hobbes dan Machiavelli menempatkan kesatuan negara sebagai yang utama, yang membuat negara menjadi stabil dan tidak mengalami konflik horizontal. Namun dengan adanya globalisasi, perkembangan pesat teknologi dan kekuatan sosial media, maka menjadikan Indonesia sebagai negara otoriter seperti dulu akan sulit, bila tidak disebut mustahil untuk dilakukan. Penting untuk mempelajari pemikiran kedua tokoh ini karena baik Machiavelli maupun Hobbes mementingkan persatuan dan keutuhan negara, serta menghindari negara menjadi pecah karena konflik dan peperangan.

Machiavelli dan Hobbes: Negara Kekuasaan sebagai Bentuk Negara Ideal

Abad Pencerahan ditandai dengan pandangan mengenai umat manusia yang dilihat dari pemikiran rasional, bukan agama. Pada masa itu, tiap pemikir biasanya memiliki perbedaan pandangan tentang kondisi alamiah manusia (*state of nature*). Yang dimaksud dengan kondisi alamiah ini adalah mengenai situasi dan perilaku manusia, sebelum adanya norma, aturan, dan struktur sosial seperti yang kita kenal sekarang (Colson, 2013). Lebih lanjut, Colson menyebutkan bahwa pemikiran mengenai kondisi alamiah manusia ini diperlukan karena dengan mengetahui kondisi alamiah manusia, maka bisa ditentukan sistem pemerintahan terbaik yang memenuhi kebutuhan warga negaranya dan mampu mengatur perilakunya. Baik Machiavelli maupun Hobbes, adalah pemikir awal di masa ini yang memandang pesimis mengenai manusia. Setelah melakukan pengamatan, Machiavelli sampai pada kesimpulan bahwa manusia itu egois, berpikir pendek, plin-plan, dan mudah diperdaya. Meskipun sifat manusia yang seperti ini seakan jadi penghalang untuk menciptakan masyarakat yang stabil, namun ia berpendapat bahwa sifat buruk manusia tersebut bisa dimanfaatkan melalui kepemimpinan yang tepat.

Hobbes punya pendapat yang lebih pesimis, bahwa manusia selalu dalam kondisi perang, "*In the state of nature, the condition of man is a condition of war of everyone against everyone*" (Colson, 2013). Pada dasarnya, tanpa pemerintahan, manusia bersifat bebas dan merdeka, tanpa kewajiban pada sekitarnya. Hobbes berasumsi bahwa akan selalu ada konflik untuk mengamankan makanan dan tempat tinggal. Colson (2013) mengutip Hob-

bes yang menyatakan bahwa, *"To this war of every man against every man... nothing can be unjust... where there is no common power, there is no law, where no law, no injustice."* Syam (2007) mengemukakan bahwa Hobbes melihat manusia tak lebih sebagai makhluk mekanik. Hal ini dikarenakan Hobbes meyakini bahwa ilmu sosial bisa diperlakukan layaknya ilmu alam, sehingga Hobbes melihat manusia juga layaknya bisa diperhitungkan seperti itu. Hobbes melihat bahwa semua manusia pada dasarnya punya kapabilitas yang kurang lebih sama, sehingga Hobbes melakukan pengamatan pada dirinya sendiri sebagai contoh perilaku manusia pada umumnya (Schmandt, 2015).

Jika manusia dilihat hanya sebagai makhluk yang peduli pada kepentingan dirinya sendiri dan akan melakukan apa saja demi memaksimalkan kekuasaannya, maka dibutuhkan otoritas yang kuat untuk mencegah terjadinya kekacauan. Dalam versi Hobbes, karena keadaan anarki antarmanusia, dibutuhkan suatu otoritas publik yang punya kekuatan koersif agar individu ini patuh. Oleh karenanya, Hobbes sebenarnya anti-demokrasi karena ia tidak menyarankan adanya pembagian maupun pemisahan kekuasaan layaknya sistem demokrasi yang populer saat ini. Hobbes melihat demokrasi sangat rentan dengan perpecahan, karena terlalu banyak pemikiran yang harus dipertimbangkan untuk suatu keputusan. Di tangan satu penguasa absolut, tentu hal tersebut bisa diminimalisir (Suhelmi, 2001; Syam, 2007).

Namun dalam pemikiran Hobbes, perjanjian ini bukan dari penguasa (*ruler*) pada rakyat (*ruled*) tapi hanya kesepakatan antarindividu untuk mengakhiri keadaan alamiah manusia dan membentuk masyarakat sipil. Dengan kata lain, Hobbes mementingkan individu-individu, yang menurutnya sebenarnya anti-sosial. Menarik untuk dilihat bahwa Hobbes mengakui pentingnya hak individu, yang tidak dcampuri oleh negara. Kebebasan ini contohnya: jual-beli, kontrak dengan pihak lain, memilih tempat tinggal, mempunyai penghasilan, memilih cara kehidupan, hingga memilih sekolah untuk anak-anak. Individu juga mempunyai hak untuk menolak jika penguasa menyuruhnya membunuh atau melukai diri sendiri, membiarkan orang lain menyerangnya, atau membuatnya tidak bisa makan, minum, berobat, dan tidak bisa menggunakan segala sesuatu yang esensial untuk hidup. Menurut Hobbes akan kontradiktif bila orang masuk dalam perjanjian sosial untuk mendapat jaminan dalam kehidupannya, tapi penguasa malah menghapus hak-hak tersebut (Schmandt, 2015).

Dalam jurnalnya, Cavallo (2014) menyebutkan bahwa Machiaveli pun sebenarnya menghormati hak-hak kepemilikan pribadi, meskipun dengan motivasi yang berbeda dari Hobbes. Hobbes mendasarkan pikirannya karena memang ia melihat masyarakat adalah individu-individu yang membutuhkan hak untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Sementara

bagi Machiavelli, pemberian penghargaan pada kehidupan pribadi tak lebih untuk mengamankan kekuasaan *'The Prince'*. Menurut Cavallo, dalam buku *The Prince*, Machiavelli memberikan satu saran jika ingin bertahan dari konspirasi dalam negeri, ataupun agresi dari luar negeri, caranya adalah: jangan sampai dibenci oleh orang lain. Hal yang bisa membuat seorang penguasa dibenci, misalnya adalah "bila ia serakah, dan agresif terhadap properti atau wanita" (Cavallo, 2014). Cavallo menambahkan, dalam *Discourse*, Machiavelli menyebutkan bahwa masyarakat dalam negara bebas (*free state/ vivere libero*) yakni: "*the possibility of enjoying what one has, freely and without incurring suspicion..., the assurance that one's wife and children will be respected, [and] the absence of fear for oneself.*"

Bila Hobbes berfokus pada pentingnya pemerintah (*the sovereign*) yang kuat untuk mengatur masyarakat, Machiavelli memfokuskan pada sang pemimpin itu sendiri. Pemikirannya ini ia tuangkan dalam buku *The Prince*, sebuah buku panduan untuk melihat bagaimana cara memanfaatkan sifat alami manusia untuk kebaikan negara. Menurutnya, manusia biasanya bersifat egois, namun saat terancam, manusia bisa berubah menjadi berani, pekerja keras, serta bisa bekerja sama. Manusia juga punya kecenderungan untuk meniru lingkungannya, daripada berpikir sendiri sebagai seorang individu. Manusia juga gampang berubah pikiran, sehingga manusia mudah sekali dimanipulasi, terutama oleh pemimpin yang lihai. Sifat-sifat ini justru menguntungkan dalam menyelenggarakan masyarakat yang stabil (Colson, 2013).

Kebutuhan untuk membentuk negara pada dasarnya adalah bentuk dari pertahanan diri manusia. Dengan membentuk suatu masyarakat politik, maka hidup manusia akan lebih damai karena berada di bawah aturan bersama yang disebut negara. Tujuan akhir pembentukan sebuah negara adalah sama, yakni negara kekuasaan (*maachtstaat*), di mana kekuasaan atau kejayaan negara itulah yang harus dicapai. Machiavelli (2008) menyebutkan bahwa sebuah negara harusnya menjadi negara yang bijak dan stabil. Oleh karenanya, segala tindakan untuk melindungi negara dan mempertahankan kekuasaan, bagaimanapun bentuknya, hal tersebut dapat saja dibenarkan (*the end justifies the means*). Pemikiran ini kemudian dianggap sebagai pembenaran bagi penguasa untuk menghalalkan segala cara. Jika pemikir-pemikir politik sebelumnya selalu melibatkan moralitas dan agama, serta mementingkan cara sama pentingnya dengan tujuan, Machiavelli berlepas dari itu semua. Dulu, penguasa-penguasa yang tiranik, despotik, dan korup 'dihakimi' oleh pemikir klasik dan Kristen karena melakukan hal-hal jahat tersebut, namun hal tersebut mendapat pembenaran dari pemikiran Machiavelli ini. Tetapi hal ini karena semata-mata bagi Machiavelli, kata *'virtu'* (kebijaksanaan) tidak ada kaitan dengan etis sama sekali, namun merupakan istilah bagi penguasa yang pandai dan lihai menggunakan segala kekuatan dan keahliannya untuk mencapai tujuan (Schmandt, 2015).

Pembenaran untuk melakukan segala hal demi kepentingan negara ini terlihat dari pemikiran Machiavelli mengenai intrik, penipuan, dan konspirasi. Ia adalah pemikir Barat pertama yang mengemukakan mengenai teori konspirasi. Intrik dan penipuan memang tidak bisa diterima dalam kehidupan pribadi, namun menurutnya, hal tersebut sangat penting bagi kesuksesan seorang pemimpin, dan dibenarkan jika digunakan demi kepentingan umum. Hal ini juga berlaku untuk perang dan kekerasan, yang boleh digunakan jika menyangkut kepentingan orang banyak (Colson, 2013). Oleh karenanya, kriteria pemimpin versi Machiavelli tidak perlu memiliki sifat atau moral yang baik, 'pura-pura' baik saja sudah cukup bagi atau dalam istilah di Indonesia sering disebut pencitraan. Winter (2014) menyebutkan bahwa Machiavelli mendukung penguasa yang harus mencitrakan dirinya sebagai penguasa yang 'tampak bermoral': "...*To strike that balance, the prince must avoid being hated by the people or being despised by the soldiers... A successful prince, after all, need not have moral qualities; he must merely 'appear to have them'.*"

Oleh karena pemimpin tidak perlu bermoral, agama tidak menjadi landasan dalam bernegara. Machiavelli dan Hobbes tidak sependapat dengan gagasan-gagasan para teolog abad pertengahan yang melihat agama dan negara sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Sekuleritas adalah kebutuhan bagi penyelenggaraan negara yang stabil. Dengan pendekatan yang berbeda, Hobbes memisahkan agama dan negara karena memandang agama adalah faktor yang menyebabkan konflik, sementara Machiavelli merupakan penganut pragmatisme, yang melihat agama dari nilai fungsinya: ia berguna sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Suhelmi (2001) menyatakan Hobbes mengkritisi agama karena semasa hidupnya, ia menyaksikan agama menjadi sumber dari konflik sosial di masyarakat. Menurutnya, manusia takut akan hal-hal di luar dirinya, dan agama memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan ketakutan manusia pada Tuhan. Akibatnya, manusia termotivasi untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti membunuh dengan dalih agama.

Menurut Colson (2013), bentuk negara terbaik versi Machiavelli adalah republik. Ia merujuk pada Republik Roma, dimana terdapat konstitusi, partisipasi rakyat, dan terlindungi oleh tentara yang kuat. Machiavelli ragu untuk merujuk republik sebagai bentuk pemerintah terbaik, karena dalam *The Prince* ia condong mengatakan bahwa bentuk negara terbaik ada pada satu penguasa absolut. Tipe republik akan menjadi ideal bila karakter politik rakyat mendukung. Menimbang psikologi Machiavelli yang percaya bahwa sifat dasar manusia yang tiran, diperlukan satu penguasa yang lebih kejam dan absolut untuk menciptakan tatanan masyarakat. Sehingga Machiavelli sebenarnya adalah pemikir yang anti-demokratis dan membuka jalan bagi totalitarianism (Schmandt, 2015).

Menurut Colson (2013), pada dasarnya Machiavelli menentang intervensi gereja. Machiavelli memandang agama memiliki makna apabila berguna bagi kepentingan politik kekuasaan. Machiavelli tidak terlalu peduli dengan asal, ajaran, doktrin, dan sebagainya dari suatu agama. Yang penting, nilai yang diajarkan oleh agama tersebut bisa dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan. Oleh karena itu, Machiavelli menyarankan pada penguasa agar tetap mempertahankan dan memelihara agama dan ritual beribadahnya, dengan tujuan negara terhindar dari sifat buruk manusia seperti korupsi, dan membuat penguasa mudah untuk memelihara dan mengatur negara asal bisa memanfaatkan aspek religiusitasnya. Dengan demikian, penguasa akan mudah mempertahankan negara rakyatnya tetap kuat (Suhelmi, 2001).

Baik Hobbes maupun Machiavelli adalah orang-orang realis. Keduanya tidak terjebak dalam pemikiran idealis dan mereka terlepas dari pemikiran teolog-teolog abad pertengahan yang mengutamakan nilai-nilai moralitas dan agama. Mereka berusaha melihat manusia dari pendekatan realitas sosial, dan justru memberikan pencerahan dan pengetahuan mengenai sisi gelap manusia tersebut. Mereka memberikan pengakuan bahwa sisi gelap manusia tersebut seharusnya tidak luput atau tidak diabaikan sama sekali.

Dari konteks sosial di masa kedua pemikir tersebut hadapi, yakni peperangan dan perpecahan, solusi terbaik saat itu adalah memperkuat posisi penguasa atas masyarakat sipil. Keduanya sebenarnya memiliki fokus yang berbeda, yakni Hobbes berfokus pada pemerintahan yang kuat, sementara Machiavelli berfokus pada sosok pemimpin yang bisa mengendalikan masyarakat. Meski penyelenggaraan kekuasaan menjadi despotik, namun keduanya sepakat bahwa dengan cara seperti itulah peperangan, pemberontakan, dan perpecahan dalam negeri tidak terjadi. Di saat itulah tercapai kehidupan ideal yang diinginkan baik oleh Hobbes maupun Machiavelli, dimana kekuasaan bisa meredam anarki di masyarakat.

Wajah Negara Kekuasaan dan Absolutisme Politik di Masa Orde Baru

Cita-cita besar stabilitas politik yang diikuti dengan dorongan pengaplikasian Pancasila yang menyeluruh sebenarnya adalah salah satu kunci kuat Suharto (Munif 2015). Konsep negara kekuasaan yang Machiavelli dan Hobbes tawarkan merupakan solusi agar negara menjadi kuat dan tak mudah pecah. Negara yang kuat akan menghasilkan perdamaian, dan hal itu juga untuk kebaikan seluruh masyarakat dalam negara itu. Sentralisasi menjadi sebuah pilihan di masa pemerintahan Suharto. Era Orde Baru, menurut Raditya (2015) masih terjebak dengan kepemimpinan yang semu, sehingga siapa pun yang berkuasa, sebenarnya masih terkekang dan tidak bisa keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pusat. Konsep desentralisasi di Indonesia baru muncul setelah tumbangannya kekuasaan Suharto dan muncul pada transisi Orde Baru menuju era Reformasi.

Sentralisasi saat itu dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru dengan cara memberikan kesempatan bagi oknum militer untuk menjadi kepala-kepala daerah, yang pada akhirnya membawa preseden buruk mengenai regenerasi kepemimpinan yang tidak pernah terjadi secara demokratis. Pemerintahan Suharto sangat erat kaitannya dengan dominasi militer di berbagai bidang. Setiap pos-pos penting dalam pemerintahannya diisi oleh tentara. Winter (2014) menyebutkan bahwa Machiavelli mendukung keberadaan tentara dalam negara: *“Good arms make good laws, and that from good arms, good friends result. Good arms (and good friends) will protect the prince against internal and external dangers, but soldiers pose a constant threat in the form of conspiracies.”* Dalam *The Prince*, dasar utama semua negara adalah hukum dan tentara yang baik. Tidak mungkin ada hukum yang baik tanpa tentara yang baik. Artinya, negara harus berada di atas landasan hukum dan militer yang merupakan wujud konkret kekuatan dan kekuasaan yang digunakan untuk memaksakan hukum pada warga negara. Militer yang baik sebagai wujud kekuasaan fisik merupakan prasyarat bagi hukum yang baik.

Definisi ‘militer yang baik’ sayangnya tidak diwujudkan dalam era Suharto ini. Penguasaan militer di segala bidang, yang seperti termaktub dalam Dwifungsi ABRI, justru menghilangkan fungsi utama militer dalam hal pertahanan negara. Menurut Al Araf (2018), profesionalisme militer mencakup: ahli di bidangnya (profesional di bidang pertahanan); taat hukum; tidak berpolitik; sejahtera; tidak berbisnis; dan tunduk pada sipil. Al Araf mengutip Huntington (1993) yang menyatakan bahwa: *military must be recruited, organized, trained, and equipped for combat purpose alone*. Artinya, pada masa Orde Baru, tentara sebenarnya lemah dalam kapasitas seharusnya (berperang), karena terlalu sibuk dalam politik. Dwifungsi ABRI membuat militer menjalankan fungsi di luar fungsi pertahanan. Tentara masuk dalam tata *Trias Politika*, dimana tentara ada dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena sebagian anggota legislatif sudah ditunjuk oleh Suharto, legislatif tidak mampu menjalankan fungsi kontrol seperti sekarang ini. Bahkan dalam pemerintah daerah, kepala daerah pun dulunya dipilih oleh Suharto, sehingga kekuasaan Suharto ditopang dari masyarakat lapis terbawah. Pendirian Kodam, Kodim, Babinsa bahkan keberadaan Hansip (Pertahanan Sipil) dan sejenisnya di daerah-daerah di Indonesia semakin memperkuat cengkeraman militer.

Dominasi militer yang berujung pada sentralisasi Suharto akhirnya memang menghasilkan negara Indonesia yang bersatu namun juga ditakuti rakyatnya. Militer yang berwatak ke dalam (*inward-looking*) inilah yang mengakibatkan kemunduran bagi militer negara Indonesia, karena di negara-negara lain, militer ditujukan untuk berorientasi ke luar, dengan bersiap-siap untuk menghadapi musuh dari luar negara (*outward-looking*)

bukan 'memusuhi' rakyat sendiri. Ditambah lagi, saat itu Suharto hanya memusatkan perhatiannya pada Angkatan Darat, atau dulu disebut ABRI. Masa Orde Baru tidak memberikan porsi atau perhatian yang sama pada Angkatan Laut (dulu disebut ALRI) dan juga Angkatan Udara (dulu disebut AURI), baik di bidang anggaran maupun bagian dalam pemerintahan. Ketimpangan yang berlangsung 32 tahun ini pada akhirnya berdampak di masa kini. Secara wilayah maritim dan udara, Indonesia jadi harus mengejar ketertinggalannya untuk menjaga kedua ruang wilayah itu. Ancaman-ancaman yang ada saat ini pun tidak bisa dikelola melalui angkatan darat saja, tapi juga harus melalui laut dan udara. Padahal, anggaran militer untuk udara dan laut sangat mahal karena teknologi tinggi yang ada pada pesawat dan kapal perang. Hal ini tentu tidak akan terjadi bila Rezim Orde Baru benar-benar memperhatikan darat, laut juga udara, dan bukan hanya memperhatikan satu aspek saja.

Di masa Orba, pemerintah paham bahwa penguasaan informasi dan peningkatan citra sangat signifikan perannya. Penguasaan terhadap media adalah salah satu penyebab otoritarianisme Suharto bertahan lama (Pratikno, 1998). Orde Baru berusaha membangun satu citra pemerintahan yang stabil, baik secara politik dan secara ekonomi. Hal itu terlihat dari konsolidasi politik yang dilakukan Suharto terhadap semua instansi pemerintah dan media pers pada saat itu (Hadi dan Kasuma, 2012). Citra baik pemerintah Suharto terus-menerus dikuatkan dalam wacana-wacana yang dikuasai oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan tak ada kesempatan bagi wacana-wacana alternatif untuk mendapatkan tempat di publik (Pratikno, 1998). Aktivitas pers dan media pun terbatas karena ada lembaga-lembaga yang pemerintah siapkan, salah satunya Departemen Penerangan, untuk terus menyeleksi mana yang bisa sampai pada masyarakat dan mana yang harus tetap berada di meja redaksi. Hal ini dirancang oleh Suharto agar tidak ada oposisi yang dominan selama Suharto memegang kekuasaan sebagai presiden. Digaungkannya isu komunis pun adalah salah satu upaya untuk menyingkirkan lawan politiknya (Rajab, 2004).

Salah satu contoh penguasaan pada pers zaman itu adalah dibredelnya harian Kompas dan 12 harian lainnya sejak Januari 1978. Menurut Sularto (2015), *Kompas* pada saat itu akhirnya menandatangani surat pernyataan maaf, disertai dengan beberapa persyaratan, antara lain: 1) tidak akan menulis tentang keluarga Presiden Suharto dan asal-usul kekayaan keluarganya; 2) tidak akan mempersoalkan dwifungsi ABRI; 3) tidak akan menulis tentang masalah-masalah yang ada kaitannya dengan SARA; 4) tidak menulis hal yang bisa memperuncing konflik. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh pemimpin redaksi Kompas Jacob Oetama, tanggal 5 Februari 1978 di Sekretariat Negara. Setelah itu, keesokan harinya harian Kompas dan beberapa harian lain pun diterbitkan kembali.

Menurut Hobbes, agama sebaiknya dipisahkan dari negara. Era Orde Baru pun sesungguhnya punya kecenderungan untuk sekuler, dimana semua organisasi masyarakat hanya boleh mengakui demokrasi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi, serta simbol-simbol agama Islam seperti jilbab dilarang digunakan di sekolah-sekolah negeri (Woodrich, 2017). Namun, untuk beberapa hal, Suharto masih mengatur agama seperti Surat Edaran Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI Nomor 224, Tahun 1980; Nomor KEP 111/J-A/10/1980, tertanggal 15 Oktober 1980, antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Meskipun penetapan ini sangat merugikan etnis Tionghoa serta aliran kepercayaan atau agama lokal, bahkan sebenarnya bertentangan dengan Pasal 29 (2) UUD 1945.

Selain itu, tahun-tahun kepemimpinan Suharto, dapat terlihat juga upaya Suharto untuk mengambil hati dan membentuk citra yang bersahabat terhadap umat muslim di Indonesia. Pada awal-awal kepemimpinan era ini, Suharto berupaya membendung Islam sebagai sebuah aktivitas politik. Meski demikian, pengaruh Islam tumbuh begitu luas terutama sejak tahun 1980-an, yang mengakibatkan pemerintah akhirnya 'mengalah' dan mengakui bangkitnya gerakan Islam dengan membatalkan larangan mengenakan jilbab, mengesahkan RUU Pengadilan Islam, serta publikasi masif ibadah umrah dan kemudian haji yang dilakukan oleh Presiden Suharto tahun 1991 memberikan pesan kuat bahwa Era Orde Baru akan lebih merangkul umat muslim (Woodrich, 2017). Selain itu, dikeluarkannya KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang menurut Munif dianggap sebagai salah satu pencapaian yang luar biasa, karena mampu mendapatkan dukungan dan persetujuan secara konsitutional di masa Orde Baru saat itu (2015).

Lebih lanjut, Munif (2015) menyatakan, bahwa prasangka negatif terhadap kebijakan ini pun juga cukup banyak bermunculan karena KHI ini dilahirkan ke ranah publik sebagai salah satu perpanjangan tangan agenda politik Suharto di masa Orde Baru. Suharto menggunakannya sebagai salah satu cara mengamankan semua motivasi politiknya agar tidak mengalami hambatan dan pertentangan dari umat Muslim, dengan kata lain, Suharto tahu bahwa Islam, sebagai agama mayoritas, bisa digunakan menjadi sumber dukungan kekuatan politik. Jika ditinjau dari Machiavelli, pemikiran Suharto ini tentu akan dianggap tepat, karena agama digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan.

Kepatuhan rakyat yang dipaksakan pada penguasa dan negara, tidak menunjukkan kemajuan bagi negara itu sendiri seperti yang diangan-kan Hobbes yang anti-demokratis. Meski sudah melakukan penguasaan dan menjadi penguasa yang bisa dibilang totaliter, kekuasaan adalah untuk diri Suharto sendiri serta keluarga, bukan untuk negara. Pada masa Suharto, korupsi tetap terjadi, karena tujuan dari kekuasaan itu adalah untuk

melanggengkan kekuasaan diri sendiri, bukan untuk kepentingan negara. Terbukti dengan secara sistematis melanggengkan kekuasaan Partai Golkar dan pencalonan dirinya sebagai Presiden hingga 32 tahun lamanya dengan kasus-kasus megakorupsi yang dilakukannya.

Indonesia telah menunjukkan ciri negara *Leviathan* pada masa Orde Baru. Presiden Suharto saat itu berhasil membuat institusi dan mekanisme yang kuat sehingga pemerintahannya bisa berlangsung lama, yakni 32 tahun. Namun, meski dengan berbagai upaya untuk menjadikan negara menjadi negara yang kuat, bahkan cenderung sewenang-wenang, Orde Baru pada akhirnya tetap runtuh. Keruntuhan rezim Orde Baru menunjukkan bahwa ada hal-hal yang harus digarisbawahi dalam pemikiran Hobbes dan Machiavelli. Dalam beberapa butir pemikirannya, Hobbes menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang anarki, namun pembentukan negara sesungguhnya menunjukkan nilai humanitarisme itu sendiri. Ketika negara dibentuk, tujuan awalnya adalah untuk melindungi manusia itu. Jadi, dalam pemikiran Hobbes, negara harus menjadi kuat agar ia tak mudah terbelah untuk menghindari kemungkinan anarki antara manusia itu. Menghindari anarki, konflik, dan peperangan artinya hidup damai dalam satu 'payung' yang dinamakan negara.

Seperti pemikiran Thomas Hobbes dalam Colson (2013), manusia menyerahkan sebagian kedaulatannya pada negara dengan tujuan agar merasa aman dan terlindungi dari manusia lainnya. Akal mengajarkan lebih baik hidup damai di bawah kekuasaan negara dan hukum dari pada hidup bebas tetapi tidak aman dan terancam. Namun di sisi lain, ketika negara diberikan kekuasaan yang begitu besar dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyat, maka hal itu akan menjadi masalah. Karena penggunaan kekerasan dan ancaman pada rakyat akhirnya akan memberikan rasa takut dan tidak aman pada rakyat. Apalagi, dalam pemikiran Hobbes, ada hak-hak individu, terutama menyangkut hak dasar seperti papan, sandang, pangan, pendidikan, dan lain-lain. yang seharusnya tidak dirampas dari rakyat. Dalam pemikiran Machiavelli pun, penting untuk tidak membuat diri penguasa menjadi dibenci, dan tidak bersikap serakah, karena itu akan membuat masyarakat marah dan melakukan perlawanan dari dalam.

Seperti telah disebutkan di atas, masyarakat menyerahkan haknya pada penguasa bukan agar hak tersebut dihapus darinya. Pemikiran absolutisme Hobbes namun dengan memperhatikan hak individu inilah yang seringkali diabaikan para pemimpin otoriter seperti Suharto. Begitupun Machiavelli telah menekankan bahwa penguasa haruslah membuat masyarakat menjadi puas, karena ketidakpuasan akan membuat masyarakat marah. Padahal, itulah tujuan utama dari pemberian sebagian hak kepada negara tadi, yaitu rasa aman dan terlindungi. Ketika negara tidak memberikan rasa aman itu, bahkan menjadikan rasa takut sebagai alat untuk

menegakkan aturan, maka masyarakat akan mencari jalan untuk keluar dari rasa takut itu. Dari tingkat yang kecil seperti ketidakpatuhan, hingga tingkat yang ekstrim yaitu pemberontakan atau kudeta dan penggantian struktur. Inilah yang menurut penulis, menjadi penyebab dari runtuhnya negara bermodel *Leviathan* seperti Indonesia masa Orde Baru tersebut.

Kesimpulan

Masa Orde Baru yang otoriter memang meninggalkan jejak pelanggaran terhadap hak-hak asasi, namun ternyata muncul suara-suara yang menginginkan kembalinya Orde Baru karena kestabilan atas ekonomi, sosial dan politiknya. Ketidaksempurnaan sistem demokrasi yang berujung pada perpecahan, konflik serta kesenjangan sosial menumbuhkan kembali keinginan untuk kembali pada masa Orde Baru dengan sentralisasi kekuasaannya. Menguatnya wacana untuk sedikit demi sedikit mengembalikan kebijakan-kebijakan era Suharto pada masa itu, memunculkan kembali diskursus di masyarakat, apakah demokrasi yang telah Indonesia lakukan adalah langkah yang tepat.

Pemikiran kedua tokoh, yakni Machiavelli dan Hobbes, tak lepas dari kritikan karena dianggap memberikan pembenaran dan legitimasi terhadap negara yang tirani dan despotik, namun baik Machiavelli maupun Hobbes berpendapat bahwa negara kekuasaan adalah yang terbaik. Mungkin untuk masa sekarang, di mana nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai kemanusiaan dipromosikan ke seluruh dunia, pemikiran Machiavelli dan Hobbes bisa jadi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Kontribusi Machiavelli adalah pemahamannya mengenai negara kekuasaan yang pada dasarnya dilihat dengan pendekatan pragmatis serta bagaimana cara penguasa mewujudkan negara yang bermoral sebagai tujuan akhirnya, namun melalui cara-cara yang justru amoral. Sistem demokrasi yang sekarang merupakan sistem yang dominan digunakan di seluruh dunia, bagi Hobbes justru sistem dengan pembagian kekuasaan tersebut jauh dari sempurna, karena rentan terhadap perpecahan dan konflik. Namun resiko mengakomodasi perbedaan dalam negara demokrasi bisa diantisipasi dengan pengutamaan kekuatan negara. Apabila negara kuat di berbagai bidang, mampu menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (air, makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya), serta memberikan hak-hak bagi individu untuk melakukan hal-hal yang penting bagi pemenuhan diri sendiri, maka dengan sendirinya masyarakat akan merasa nyaman dalam naungan negara tersebut.

Tentu kondisi demokrasi Indonesia saat ini tidak membenarkan penggunaan ancaman apalagi koersi atas nama kebaikan negara. Dibukanya keran kebebasan berpendapat, didukung dengan globalisasi serta pertumbuhan pesat media sosial, sulit membayangkan masa Orde Baru dimana

pengatasnamaan negara untuk kepentingan pribadi penguasa dikembalikan ke NKRI. Namun, konsekuensi penerapan demokrasi di masa kini bukan hanya ditekankan pada kekuatan dan keahlian penguasa seperti pemikiran Machiavelli dan Hobbes, tapi juga menuntut kedewasaan berpikir dari masyarakat. Masyarakat yang belum dewasa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, akan kesulitan dalam menjalankan demokrasi karena sistem tersebut menuntut keseimbangan hak dan kewajiban yang dicapai oleh individu. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka perpecahan, pemberontakan, dan peperangan dalam negeri akan mudah terjadi, seperti pendapat Hobbes dan Machiavelli.

Daftar Pustaka

- Al Araf. (2019). Tugas Perbantuan TNI. Diskusi Publik 'Problematika Pengaturan Tugas Perbantuan TNI', 8 Februari, FISIP UNPAR, Bandung.
- Cavallo, J.A. (2014). On Political Power and Personal Liberty in *The Prince and The Discourses*. *Social Research* 81(1): 107-132.
- Colson, R. (ed). (2013). *The Politics Book*. London: Dorling Kindersley Limited.
- Fatimah, S. (2007). Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru. *Jurnal Demokrasi* 6(2): 99-110.
- Hadi, D.H. & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Verleden* 1(1): 40-50.
- Ledeem, M. (1999). Impeachment: The Machiavellian View. *Society* 36(3): 37-39.
- Machiavelli, N. (2008). *The Prince*. Second Edition. Terj: Harvey C. Mansfield. Chicago dan London: The University of Chicago Press.
- Munif, N.A. (2015). KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter). *AH-KAM* 3(2): 265-286.
- Ogbazi, P. (2019). State Absolutism and Moral Agency in the Political Philosophy of Thomas Hobbes and Niccolo Machiavelli: Implications for Eritrea. *African Studies Quarterly* 18(3): 47-63.
- Pratikno. (1998). Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2(2): 18-33.
- Raditya, M. (2015). Kontestasi Kekuasaan dan Keteladanan Semu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19(1): 1-16.
- Rajab, B. (2004). Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh. *Jurnal Sosiohumaniora* 6(3): 182-202.
- Schmandt, H. (2015). *Filsafat Politik, kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, terj. I. Baidlowi dan A. Baehaqi, Cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Schmitt, C. (1996). *The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes, Meaning and Failure of a Political Symbol*. London: Greenwood Press.
- Suhelmi, A. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sularto, S. (2015). *Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Oetama*. Jakarta: Kompas.
- Syam, F. (2007). *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winter, Y. (2014). The Prince and His Art of War: Machiavelli's Military Populism. *Social Research* 81(1): 165-191.
- Woodrich, C. (2017). Perkembangan Islam dan Praktek Islam dalam Selebaran Film Indonesia di Era Suharto (1966-1998). *Jurnal Wardah* 18(1): 13-33.
- Yusdani. (2004). Konfigurasi Kepemimpinan Nasional Perspektif Pluralisme Agama di Indonesia. *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 52(2): 170-178.
- Yusuf, H. (2012). Pergumulan Pemikiran Politik Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global. *Jurnal TAPIS* 8(2): 100-118.